

Implementasi jaminan fidusia untuk pemberian kredit kepada usaha kecil

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324732&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan partisipasi dari semua lapisan masyarakat ekonomi, dimana lapisan masyarakat ekonomi yang terbesar adalah golongan pengusaha kecil. Pemerintah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit untuk usaha kecil. Pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Skripsi ini meneliti Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan fokus pelaksanaan pengikatan Jaminan Fidusia untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan keterbatasan biaya dan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul pada saat dilakukan eksekusi. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kemudian mencari pemecahan permasalahan yang timbul dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah ada khususnya pengaturan untuk kredit usaha kecil. Dalam pelaksanaan pengikatan jaminan Fidusia, ada beberapa bank yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan alasan bahwa debitur tidak berkeinginan untuk mengikuti aturan pengikatan jaminan oleh karena biaya pengikatan secara notariil bagi debitur dirasakan sangat tinggi, sedangkan kredit usaha kecil biasanya berjangka pendek. Disamping itu peraturan mengenai eksekusi untuk KUK juga belum diakomodasi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya mengenai "parate eksekusi". Pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek perbankan masih mendapat hambatan birokrasi karena kantor Lelang Negara tidak bersedia melakukan lelang agunan sebelum ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.